

PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Fajar Miftahul Khoir

18.02.51.0082

Fakultas hukum dan Bahasa Universitas stikubank, Semarang

fajarkhoir27@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak di antaranya adalah diversifikasi, yakni pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Kebijakan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis dan menggambarkan penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan studi kepustakaan. Metode analisa data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polda Jawa Tengah dengan melalui proses musyawarah keluarga di mana musyawarah keluarga ini dipilih dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban dengan difasilitasi oleh fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Kendala yang ditemui dalam penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana oleh anak di Polda Jawa Tengah adalah : 1) Ancaman tindak pidana dengan sanksi 7 Tahun Keatas. 2) Muncul Permasalahan Jika Orang Tua Merupakan Tokoh Masyarakat 3). Adanya Intervensi Pada Pihak Korban. 4). Kurang Optimalnya Kemampuan Penyidik Dalam Melaksanakan Kebijakan Diversifikasi. 5). Tidak ada titik temu dan kesepakatan antara korban dan pelaku. Adapun solusi dari kendala yang dihadapi adalah: 1) Ancaman pidana kurungan ditinjau kembali. 2). Jika orangtua tokoh masyarakat harus kooperatif. 3). Perlu dihilangkan intervensi dari pihak manapun. 4). Pengoptimalan kemampuan penyidik. 5). Upaya mediasi antara korban dan pelaku. Penerapan kebijakan diversifikasi dimasa yang akan datang adalah bahwa diversifikasi harus secara konsisten dapat dilakukan dalam tindak pidana anak.

Kata Kunci : Kebijakan, Diversifikasi, Pelaku Anak

ABSTRACT

Actions taken by the police in dealing with cases committed by children include diversion, namely the idea of granting authority to law enforcement officers to take policy actions in dealing with or resolving child violations by not taking formal steps, including stopping or not continuing. / release from the criminal justice process or return / hand over to the community and other forms of social service activities. The diversion policy can be carried out at all levels of examination, namely from investigation, prosecution, examination at a court hearing to the stage of implementing the decision. The research objectives in this study are to assess and analyze the application of diversion policies towards children as perpetrators of, and the obstacles in implementing the diversion policy towards children as perpetrators of criminal acts. This study uses a sociological juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. Methods of data collection using observation and literature study. Methods of data analysis using qualitative. The results of the study concluded that the application of diversion in handling criminal acts committed by children going through a family deliberation process where this family deliberation was chosen in resolving criminal cases committed by children was intended to resolve child cases through deliberation involving the perpetrator's family. The obstacles encountered in the application of diversion in handling criminal acts by children at the Central Java Regional Police are: 1) Threats of criminal acts with sanctions of 7 years and over. 2) Problems Appear If Parents Are Community Leaders 3). The existence of intervention on the side of the victim. 4). Lack of Optimal Ability of Investigators in Implementing Diversion Policy. 5). There is no common ground and agreement between the victim and the perpetrator. The solutions to the obstacles faced are: 1) The threat of imprisonment is reviewed. 2). If parents, community leaders must be cooperative. 3). Need to eliminate intervention from any party. 4). Optimization of investigator capabilities. 5). Efforts to mediate between the victim and the perpetrator. The application of the diversion policy in the future is that diversion must consistently be carried out in child crimes.

Keywords: Policy, Diversion, Child Actors